LAPORAN KEGIATAN

PENDAMPINGAN MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PPID PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID IAIN PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PPID PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

A. Identitas Kegiatan

1. Nama Kegiatan : Pendampingan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID PTKN
2. Pelaksana : PPID Utama Kementerian Agama RI
3. Waktu dan tempat Pelaksanaan : Kamis, 3 Juli 2025 di Ruang Pertemuan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Lt. 2 Kantor Kementerian Agama RI

B. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Sebagai badan publik, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama RI melalui PPID Utama menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Monitoring KIP pada PPID PTKN yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh PTKN se-Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen, melakukan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan KIP di lingkungan PTKN berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Surat Tugas Rektor IAIN Parepare Nomor B-177/In.39/KP.01.2/07/2025 tanggal 2 Juli 2025, kami ditugaskan untuk menghadiri kegiatan dimaksud, sekaligus membawa laporan hasil kegiatan sebagai bahan tindak lanjut di tingkat institusi.

Dipindai dengan CamScanner

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Jalannya Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pada hari Kamis, 3 Juli 2025 bertempat di Ruang Pertemuan Sekjen Kemenag RI. Acara dibuka pukul 09.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 13.15 WIB.

Peserta kegiatan berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari perwakilan PTKN seluruh Indonesia, meliputi Wakil Rektor II, Kepala Biro, Humas, serta operator PPID. Dari unsur pimpinan Setjen Kemenag hadir Kepala Biro HDI, pejabat PPID, serta pejabat fungsional humas.

2. Pembukaan dan Arahan

Acara dibuka oleh Kepala Biro HDI mewakili Sekretaris Jenderal Kemenag RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait arah kebijakan KIP di PTKN, antara lain:

a. Menteri Agama RI menaruh perhatian serius terhadap keterbukaan informasi publik pada PTKN, dan meminta setiap perguruan tinggi untuk menjadikannya prioritas.
b. Menteri Agama RI memperoleh predikat terbaik 1 sebagai Menteri paling informatif dalam jajaran Kabinet Merah Putih, sementara Kementerian Agama RI berada pada peringkat ke-13 lembaga paling informatif nasional.
c. Saat ini hanya terdapat 5 PTKN yang berhasil meraih predikat lembaga informatif, sementara mayoritas lainnya masih belum informatif.
d. Monitoring KIP merupakan bentuk keseriusan Kementerian Agama dalam memperbaiki tata kelola informasi publik di PTKN dan akan dilakukan secara berkelanjutan.
e. Monitoring KIP PTKN dilaksanakan langsung oleh Komisi Informasi Pusat RI dengan tahapan yang akan dimulai pada akhir Juli 2025.
f. Kementerian Agama RI akan memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) KIP di berbagai lokasi, dan IAIN Parepare ditetapkan sebagai peserta Bimtek yang akan dilaksanakan di Makassar secara luring (offline).

D. Catatan Penting Kegiatan

1. Berdasarkan materi, diskusi, dan arahan dalam kegiatan, beberapa catatan penting dapat dirangkum sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Setiap PTKN wajib segera memperkuat struktur dan mekanisme PPID, baik di tingkat utama maupun pelaksana.
b. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) menjadi indikator utama dalam menilai keterbukaan informasi di PTKN.
c. Website PPID harus dioptimalkan sebagai kanal utama pelayanan informasi publik.
d. PTKN yang belum memperoleh predikat informatif perlu melakukan pembenahan menyeluruh melalui penyusunan dokumen, pembaruan konten website, dan peningkatan kapasitas SDM PPID.
e. Humas PTKN berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan operasional pelayanan informasi publik.

E. Usulan Tindak Lanjut

Sebagai hasil dari keikutsertaan pada kegiatan ini, kami mengajukan usulan tindak lanjut yang dapat segera dilaksanakan di IAIN Parepare, yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun Borang KIP Tahun 2025.
2. Optimalisasi Website PPID IAIN Parepare.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Internal.
4. Monitoring dan Evaluasi Rutin.

F. Penutup

Kegiatan Pendampingan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID PTKN yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Agama RI memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya tata kelola informasi publik yang baik di lingkungan PTKN.

Bagi IAIN Parepare, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan PPID, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memastikan transparansi sebagai wujud akuntabilitas publik. Dengan tindak lanjut yang terstruktur, diharapkan IAIN Parepare dapat meraih predikat sebagai lembaga yang informatif di tingkat nasional.

Demikian laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekaligus bahan evaluasi dan tindak lanjut di lingkungan IAIN Parepare. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, diucapkan terima kasih.

Parepare, 4 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

Parepare, 4 Juli 2025

Yang membuat,-

Wakil Ketua PPID

Dr. Suherman, M.M.

Mengetahui,-

Wakil Rektor II/ PPID Utama

Dr. Firman, M. Pd.

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Kegiatan





Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner